BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Demokrasi di Indonesia bisa terbilang baik terbukti dengan adanya pemilihan Presiden, DPR/DPD, Bupati, dan Walikota dengan mengunakan sistem dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan menerapkan sistem demokrasi, masyarakat Indonesia bisa memilih langsung calon pemimpinnya secara bebas dengan menggunakan hak pilihnya (KPU Kabupaten Bandung, 2010, hal.2). Sistem pemilihan calon pemimpin atau tata cara yang digunakan untuk memilih calon pemimpinya adalah dengan mendatangkan masyarakat ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk melakukan hak pilihnya

Pada saat ini KPU (Komisi Pemilihan Umum) selaku lembaga pemerintah penyelenggara Pilkada akan mengadakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia, yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Dengan banyaknya daerah di Indonesia yang melakukan Pilkada serentak tentu bukan hal mudah untuk KPU memberikan sosialisasi kepada masyarakat. KPU dalam hal ini sangat berperan penting karena dari awal proses dimulainya pemilihan umum, KPU yang melakukan tugasnya untuk menjalankan pemilihan umum secara terstruktur, baik, dan benar. Maka dari itu salah satu tugas KPU adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana aturan Pemilu itu sendiri atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Bandung selaku salah satu lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan Pilkada 2015 tentu bukan hal mudah untuk melakukan sosialisasi secara merata di daerah Kabupaten Bandung, itu semua karena luasnya Kabupaten Bandung dan banyaknya media-media informasi yang banyak dipasang di area-area jalan yang bukan tujuan sosialisasi dan kurangnya jenis-jenis media sosialisasi pada saat Pilkada Kabupaten Bandung 2010 sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan Pilkada Kabupaten Bandung 2015.

Sosialilisasi wajib dilakukan KPU untuk memberikan kesadaran pada masyarakat akan hak pilihnya. Hasil kuesioner yang dilakukan kepada 250 responden di sejumlah daerah di Kabupaten Bandung pada tanggal 5 sampai tanggal 12 Mei 2015 menyatakan bahwa 230 responden tidak mengetahui akan ada Pilkada di Kabupaten Bandung pada tanggal 9 Desember 2015. Maka dari itu KPU Kabupaten Bandung wajib melakukan sosialisasi agar tidak terjadi kurangnya informasi masyarakat tentang Pilkada sehingga menyebabkan beberapa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.

Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Bandung harus terstruktur dan baik, agar tidak terjadi kesalahan atau kurangnya informasi kepada masyarakat pada saat Pilkada.

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka yang akan menjadi pembahasan dalam identifikasi masalah adalah:

- Masih kurang meratanya informasi kepada masyarakat tentang Pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung.
- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung.

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut

”Bagaimana menyampaikan informasi secara merata dan menarik yang mudah dipahami oleh masyarakat ?”

I.4. Batasan Masalah

Untuk menghindari luasnya ruang lingkup permasalahan, batasan masalah ini terfokus pada masalah informasi dan sosialisasi yang akan diberikan oleh KPU Kabupaten Bandung di seluruh Kabupaten. Informasi yang diberikan diupayakan

dapat memberikan pemahaman untuk ikut serta kedalam Pilkada serentak 9 Desember 2015.

I.5. Tujuan Perancangan

Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bandung 2015.